



## Menelanjangi Mens Rea Sendenbu: Analisis Linguistik Forensik terhadap Tindak Tutur Komisif Manipulatif pada Slogan “Nippon Cahaya, Pelindung dan Pemimpin Asia”

Arsyiatin Arroby

Magister Linguistik, Universitas Jendral Soedirman, Indonesia

Penulis korespondensi: [araobie13@gmail.com](mailto:araobie13@gmail.com)

**Abstract.** *This research deconstructs the manipulative architecture in the propaganda trilogy of the Japanese Army in 1942, namely Nippon Tjahaja Asia, Nippon Pelindoeng Asia, and Nippon Leader Asia, which have often been reduced to mere political euphemisms. With a descriptive-qualitative design, this study integrates Malcolm Coulthard and Alison Johnson's parameter-based Forensic Linguistics as the grand theory, as well as the three-dimensional model of Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis (AWK) as an operational analysis instrument. The results of the analysis show that lexical manipulation through the messianic triptych "Light, Protector, Leader" and the use of assertive clauses without copula are engineered to produce false consciousness. Forensic Linguistic Parameters confirm the existence of a planned mens rea (malicious intent) from Sendenbu, with an extreme disparity between commissive speech in the form of a promise of protection and military actus reus in the form of romusha slavery and logistical seizure. This condition fulfills the elements of mass deception. Furthermore, the doctrinal repetition of the slogan is a form of linguistic coercion that exploits power asymmetry to castrate the people's critical reasoning. In conclusion, the invasion of Japanese fascism in Indonesia did not only take place through military equations, but also through a cognitive dictatorship based on language fabrication. This study is relevant as a historical mirror for detecting the anatomy of structural lies in the contemporary post-truth era.*

**Keywords:** *Critical Discourse Analysis (CDA); Forensic Linguistics; Language Crimes; Propaganda; The Three A's Movement.*

**Abstrak.** Penelitian ini mendekonstruksi arsitektur manipulatif dalam trilogi propaganda Balatentara Jepang tahun 1942, yaitu Nippon Tjahaja Asia, Nippon Pelindoeng Asia, dan Nippon Pemimpin Asia, yang selama ini kerap direduksi sebagai eufemisme politik semata. Dengan desain deskriptif-kualitatif, penelitian ini mengintegrasikan Linguistik Forensik berbasis parameter Malcolm Coulthard dan Alison Johnson sebagai grand theory, serta model tiga dimensi Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough sebagai instrumen analisis operasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa manipulasi leksikal melalui triptik mesianik “Cahaya, Pelindung, Pemimpin” dan penggunaan klausa asertif tanpa kopula direkayasa untuk memproduksi kesadaran palsu (false consciousness). Parameter Linguistik Forensik mengonfirmasi adanya mens rea (niat jahat) yang terencana dari Sendenbu, dengan disparitas ekstrem antara tindak tutur komisif berupa janji perlindungan dan actus reus militer berupa perbudakan romusha serta perampasan logistik. Kondisi ini memenuhi unsur delik penipuan publik (mass deception). Lebih lanjut, repetisi doktriner atas slogan tersebut merupakan bentuk koersi linguistik yang mengeksploitasi asimetri kekuasaan untuk mengebiri nalar kritis rakyat. Kesimpulannya, invasi fasisme Jepang di Indonesia tidak hanya berlangsung melalui ekuasi militer, tetapi juga melalui kediktatoran kognitif berbasis fabrikasi bahasa. Studi ini relevan sebagai cermin historis untuk mendeteksi anatomi kebohongan struktural pada era post-truth kontemporer.

**Kata kunci:** Analisis Wacana Kritis; Gerakan 3A; Kejahatan Bahasa; Linguistik Forensik; Propaganda.

### 1. LATAR BELAKANG

Konflik global seperti kolonialisme seringkali meninggalkan jejak yang tak hanya bersifat fisik dan politis, tetapi juga linguistik. Bahasa, melalui konteks kekuasaan bertransformasi dari alat komunikasi menjadi instrumen kontrol dan membenaran ideologis (Zahri Nasution, 2007). Slogan-slogan ini, yang akrab ditelinga masyarakat kala itu, lebih dari sekedar jargon politik, melainkan dokumen bahasa yang dirancang secara cermat untuk

mencapai tujuan geopolitik dan psikologis tertentu (Khaja & Irfan, 2019). Sebagaimana ditegaskan oleh Norman Fairclough (1995) dalam *Language and Power*, wacana adalah arena pertarungan di mana hegemoni dikonstruksi, direproduksi, dan dipertahankan. Premis ini menemukan validitas historis dan empirisnya yang paling brutal pada masa pendudukan Balatentara Jepang di Indonesia (1942-1945), khususnya melalui komodifikasi wacana propaganda Gerakan 3A: "Nippon Tjahaja Asia, Nippon Pelindoeng Asia, Nippon Pemimpin Asia".

Secara historis, kedatangan Jepang ke Nusantara memanfaatkan sentimen anti-kolonialisme Belanda yang telah mengakar. Berbeda dengan pendekatan Belanda yang cenderung paternalistik dan diskriminatif, Jepang membutuhkan cara yang lebih cepat dan efektif untuk mobilisasi sumber daya dan dukungan pribumi (Wicaksono, 2021). Penjajahan Jepang di Indonesia yang relatif singkat (1942-1945) merupakan periode transformatif yang secara radikal merubah laskap politik, sosial, dan psikologis (Fadli & Kumalasari, 2019; Ishak, 2012; Ronauli et al., 2025; Sihombing et al., 2024; Wicaksono, 2021). Untuk memuluskan transisi kekuasaan dan mencegah resistensi bersenjata dari jutaan rakyat pribumi, pemerintah militer Jepang melalui Sendenbu (Departemen Propaganda) merumuskan rekayasa linguistik berskala masif. Slogan Gerakan 3A tidak didesain sebagai sekadar retorika politik, melainkan sebagai sebuah arsitektur manipulasi kognitif yang dikalkulasi secara presisi. Sayangnya, dalam banyak literatur sejarah dan linguistik arus utama, trilogi slogan ini kerap direduksi hanya sebagai trivia sejarah atau frasa eufemisme belaka. Terdapat kekosongan literatur (research gap) yang gagal melihat teks ini sebagai sebuah artefak kriminalitas linguistik (language crimes).

Trilogi slogan tersebut- "Nippon Tjahaja Asia, Nippon Pelindoeng Asia, Nippon Pemimpin Asia"- Diciptakan bukan sekedar ad hoc, melainkan sebagai pilar naratif yang membenarkan kehadiran Jepang (Kurasawa, 1987). Secara historis, Jepang menempatkan diri sebagai "saudara tua" yang akan memimpin Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya (Dai Toa Kyo-eiken) (Gunawan, 2017; Yuni Wachid Asrori, 2024). Dalam konteks Indonesia, di mana nasionalisme mulai tumbuh, slogan ini sangat cerdas: (1) "Cahaya" menjanjikan pencerahan spiritual dan kemajuan teknologi, kontras dengan stagnasi dibawah Belanda. (2) "Pelindung" meredefinisikan kehadiran militer sebagai proteksi dari agresi Barat (terutama sekutu). (3) "Pemimpin" secara eksplisit menuntut subordinasi politik dan militer dibawah hegemoni Tokyo.

Dari perspektif linguistik forensik, teks propaganda ini menarik karena fungsinya yang ganda: informatif (mengumumkan status baru Jepang) dan persuasif (menciptakan sistem

kepercayaan baru)(Khaja & Irfan, 2019; Tarasenko, 2019). Lingkungan linguistik Indonesia saat itu didominasi oleh Bahasa Melayu (cikal bakal Bahasa Indonesia, yang dimanfaatkan Jepang sebagai lingua franca untuk mencapai basis massa yang luas. Pemilihan kata, ritme, dan repetisi slogan dalam bahasa lokal ini menunjukkan kesenjangan linguistik yang tinggi(Eka Firmansyah et al., 2023; Firmansyah et al., 2021).

Penjabaran di atas menekankan bahwa slogan tersebut harus dipandang sebagai dokumen yang compromised- yaitu teks yang telah dimanipulasi oleh pihak bekepentingan (Jepang) untuk menegaskan dan membentuk kesadaran pihak lain (pribumi Indonesia) (A Baranov & P Parshin, 2017; Khaja & Irfan, 2019). Oleh karena itu, pendekatan forensik adalah esensial untuk membongkas susunan retorika dan manipulasi yang telah menagagr dalam memori kolektif sejarah Indonesia.

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan akademis bahwa kekejaman imperialisme tidak selalu dimulai dari letusan senjata api, melainkan dari fabrikasi kata-kata. Meminjam kacamata Linguistik Forensik, teks propaganda kenegaraan yang memuat kebohongan struktural dapat diklasifikasikan sebagai delik manipulasi. Malcolm Coulthard & Alison Johnson (2007) dalam *An Introduction to Forensic Linguistics* menyatakan bahwa setiap konstruksi teks merekam "sidik jari" niat pembuatnya (authorial intent). Dalam konteks slogan 3A, janji perlindungan dan pencerahan yang ditawarkan berbanding terbalik dengan *actus reus* (tindakan aktual) berupa kerja paksa (*romusha*) dan perampasan logistik yang sistematis. Selain itu, pemaksaan kepada rakyat untuk merepetisi slogan tersebut setiap hari merupakan bentuk koersi linguistik yang mengunci ruang negosiasi, sejalan dengan postulat Malcolm Coulthard & Alison Johnson (2007) mengenai penggunaan bahasa asimetris oleh pihak otoritas untuk menundukkan pihak yang ter subordinasi.

Oleh karena itu, pembongkaran terhadap slogan Gerakan 3A mutlak diperlukan. Penelitian ini tidak hanya akan mendekonstruksi selubung kekuasaan dalam teks menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough, tetapi lebih jauh akan "mengadili" teks tersebut secara akademis menggunakan parameter Linguistik Forensik. Upaya ini bertujuan untuk membuktikan secara terukur bahwa bahasa telah digunakan sebagai instrumen kebohongan massal (*mass deception*) dan pemerkosaan kognitif demi melegitimasi fasisme berkedok solidaritas Asia.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini dibangun di atas konstruksi teoretis yang menempatkan bahasa bukan sebagai medium komunikasi yang netral, melainkan sebagai instrumen strategis yang dapat

direkayasa untuk tujuan penguasaan dan manipulasi massal. Untuk membedah fenomena tersebut, kerangka teori dibagi menjadi dua tataran: Linguistik Forensik sebagai teori utama (Grand Theory) dan Analisis Wacana Kritis (AWK) sebagai teori metodologis.

### **Teori Utama (Grand Theory): Linguistik Forensik (Coulthard & Johnson)**

Linguistik forensik secara tradisional diaplikasikan untuk kasus hukum (seperti, identifikasi penulis, analisis ancaman)(Correa, 2013; Malcolm Coulthard & Alison Johnson, 2007). Dalam studi ini, LF diperluas untuk menganalisis "kejahatan" ideologis dimana bahasa digunakan sebagai alat untuk memaksa dan mengontrol. Teks propaganda diperlakukan sebagai korpus forensik yang harus diinvestigasi untuk menemukan jejak linguistik dari intensi manipulatif(Khaja & Irfan, 2019). Fokusnya adalah pada otentisitas, atribusi intensi, dan interpretasi paksaan dalam teks yang secara historis tidak netral.

Linguistik forensik dalam penelitian ini tidak diposisikan dalam konteks peradilan pidana konvensional, melainkan sebagai paradigma teoretis untuk menginvestigasi teks historis-politis sebagai artefak "kejahatan berbahasa" (language crimes). Secara spesifik, penelitian ini bersandar pada dua pilar teoretis utama dari Malcolm Coulthard dan Alison Johnson.

### **Deteksi Kebohongan dan Niat (*Deception and Authorial Intent*) - Malcolm Coulthard**

Malcolm Coulthard & Alison Johnson (2007) menegaskan bahwa teks selalu membawa jejak niat dari pembuatnya (authorial intent). Teori ini menyediakan landasan untuk menganalisis tindak tutur manipulatif, khususnya tindak tutur komisif (janji) yang bersifat deceptive (menipu). Dalam kerangka Coulthard, kebohongan linguistik dapat dilacak melalui analisis disparitas antara struktur semantik teks (apa yang dijanjikan) dengan realitas faktual. Parameter ini digunakan sebagai grand theory untuk mendakwa bahwa propaganda Jepang bukan sekadar retorika, melainkan sebuah fabrikasi terencana yang memuat unsur mens rea (niat jahat) untuk mengeksploitasi kognisi massa di bawah kedok terminologi perlindungan.

### **Koersi Linguistik dan Asimetri Kekuasaan (*Coercive Language*) - Alison Johnson**

Sebagai pelengkap teori Coulthard, pemikiran Alison Johnson Malcolm Coulthard & Alison Johnson (2007) difokuskan pada relasi kuasa yang timpang dalam interaksi bahasa. Johnson berteori bahwa pihak yang memegang otoritas absolut akan memanipulasi struktur bahasa untuk menekan pihak yang disubordinasi, menghilangkan ruang negosiasi (turn-taking), dan memaksa lahirnya konsensus. Konsep ini menjadi landasan teoretis fundamental untuk melihat bagaimana militer fasis Jepang menggunakan struktur sintaksis absolut untuk melakukan "koersi kognitif"—memaksa masyarakat menjadikannya kebenaran tunggal tanpa ruang bantahan.

### **Teori Metodologis: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough**

Untuk membedah kompleksitas dan selubung manipulasi tersebut, Analisis Wacana Kritis (AWK) hadir sebagai ancangan utama yang memandang wacana sebagai bentuk praksis sosial (Setiawan, 2014). AWK menyediakan media untuk menganalisis hubungan dialektis antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi (Hameed Hassoon Bjaiya Al-Mas'udi & A'mer Sagheer Allwan Al-A'mery, 2021). Dalam AWK, teks (slogan) dilihat sebagai titik temu antara ideologi dominan (supremasi Jepang) yang dilegitimasi dan ideologi alternatif (nasionalisme Indonesia) yang direpresi. AWK tidak hanya menganalisis teks dari aspek otonomi kebahasaan semata, tetapi secara dialektis mengaitkannya dengan konteks sosiokultural, relasi kuasa, dan ideologi yang melatarbelakangi penciptaan teks tersebut (Norman Fairclough, 1995; Teun A Van Dijk, 2008).

Jika Linguistik Forensik berfungsi sebagai payung paradigma yang memvonis niat manipulatif teks, maka Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough dioperasikan sebagai teori metodologis (pisau bedah operasional) untuk mengekskavasi anatomi teks tersebut sebelum diserahkan pada penilaian forensik. Fairclough memandang wacana sebagai praktik sosial yang mereproduksi atau menantang dominasi kekuasaan. AWK Fairclough beroperasi melalui tiga dimensi (Model 3D) yang saling berjalani:

**Dimensi Teks (Mikrolinguistik):** Asumsi teoretis bahwa tidak ada satupun pilihan leksikon, struktur tata bahasa, atau metafora yang bebas nilai. Setiap elemen linguistik dipilih secara sengaja untuk membangun representasi realitas tertentu yang menguntungkan produsen teks.

**Dimensi Praktik Wacana (Meso):** Teks tidak lahir di ruang hampa. Dimensi ini menelaah sirkulasi kekuasaan dalam proses produksi wacana (siapa yang membuat teks dan dengan otoritas apa), distribusi (bagaimana teks itu dipaksakan ke ruang publik), dan konsumsi (bagaimana audiens diposisikan secara paksa untuk menerima dan merepetisi teks tersebut).

**Dimensi Praktik Sosial Budaya (Makro):** Teks merupakan manifestasi dari ideologi hegemonik yang lebih besar. Dimensi ini menghubungkan analisis kebahasaan dengan struktur sistemik di luar bahasa, seperti imperialisme, fasisme, dan upaya penciptaan kesadaran palsu (false consciousness) demi kepentingan eksploitasi ekonomi dan politik.

Secara rinci, slogan ini merupakan contoh tindakan tutur asertif (mengajukan klaim yang benar) yang berfungsi sebagai tindak tutur direktif (perintah terselubung), dimana klaim kebenaran berfungsi untuk memaksa audiens bertindak (mendukung Jepang) (Predrag Dojčinović et al., 2020; Riyadh Tariq Kadhim Al-Ameedi & Zina Abdul Hussein Khudhier, 2015).

Sintesis Teoretis Secara holistik, integrasi kedua teori ini menciptakan kerangka analisis yang komprehensif. Teori AWK Fairclough bekerja di garis depan untuk membongkar bagaimana selubung ideologi direkayasa melalui leksikon dan tata bahasa dalam ekosistem yang asimetris. Setelah anatomi wacana tersebut terurai, teori Linguistik Forensik Coulthard dan Johnson mengambil alih untuk menjawab apakah rekayasa ideologis tersebut secara linguistik memenuhi parameter kebohongan publik (deception) dan pemaksaan (coercion) yang disengaja (mens rea).

### **3. METODE PENELITIAN**

Pendekatan dan Desain Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis yang secara spesifik bergerak dalam koridor investigasi linguistik. Objek material penelitian adalah teks propaganda historis berupa slogan Gerakan 3A: "Nippon Tjahaja Asia, Nippon Pelindoeng Asia, Nippon Pemimpin Asia". Untuk membongkar arsitektur manipulatif di balik teks tersebut, penelitian ini mengadopsi struktur metodologis berlapis (layered methodological structure). Posisi Linguistik Forensik ditetapkan sebagai Grand Theory (teori utama/payung) yang membingkai paradigma penelitian bahwa teks propaganda ini merupakan sebuah artefak "kejahatan berbahasa" (language crime) berupa penipuan dan koersi massal. Sementara itu, Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough diposisikan sebagai metode analisis operasional (analytical tool) pada tahap awal untuk mendekonstruksi anatomi teks sebelum diekstrapolasi ke dalam konklusi forensik.

#### **Prosedur dan Tahapan Analisis Data**

Secara operasional, pembedahan data linguistik dilakukan melalui dua tahapan utama yang bersifat sekuensial dan interdependen. Tahap pertama berfungsi memetakan arsitektur ideologis, sedangkan tahap kedua berfungsi menghakimi temuan tersebut melalui kaca mata investigasi forensik.

#### ***Tahap 1 Dekonstruksi Wacana via Pendekatan AWK Norman Fairclough (Metode Analisis Awal)***

Sebelum dianalisis sebagai sebuah delik manipulasi, kalimat "Nippon Tjahaja Asia, Nippon Pelindoeng Asia, Nippon Pemimpin Asia" akan diekskavasi menggunakan model tiga dimensi AWK Norman Fairclough. Metode ini dipilih karena kemampuannya membedah teks tidak hanya secara struktural, tetapi juga mengaitkannya dengan ekosistem sosial-politik yang memproduksinya. Analisis pada tahap ini meliputi:

Dimensi Teks (Analisis Mikrolinguistik): Tahap ini membedah fitur-fitur linguistik intrinsik teks. Fokus analisis diarahkan pada identifikasi pilihan leksikal (penggunaan endonim

"Nippon" dan triptik "Tjahaja, Pelindoeng, Pemimpin"), struktur sintaksis (klausa ekuatif asertif tanpa kopula), paralelisme, dan peranti retorik. Tujuannya adalah memetakan bagaimana realitas direkayasa secara gramatikal dan semantik.

Dimensi Praktik Wacana (Analisis Meso): Pada dimensi ini, teks dianalisis sebagai sebuah komoditas interaksi. Metode ini akan melacak proses produksi (oleh Sendenbu/militer Jepang yang monopolistik), distribusi (propagasi masif via radio, poster, dan institusi pendidikan), serta konsumsi teks (pemaksaan performatif terhadap rakyat sipil di bawah tekanan militer).

Dimensi Praktik Sosial Budaya (Analisis Makro): Tahap terakhir dalam AWK ini meletakkan teks ke dalam matriks historis dan struktural yang lebih luas. Teks dianalisis sebagai manifestasi linguistik dari ideologi fasisme Hakko Ichiu yang bertujuan menciptakan hegemoni dan false consciousness (kesadaran palsu) guna menjustifikasi imperialisme.

### ***Tahap 2: Opsi Investigatif via Linguistik Forensik (Analisis Final dan Grand Theory)***

Jika AWK bertugas menjawab pertanyaan "bagaimana teks ini membangun ideologi dan kekuasaan?", maka Linguistik Forensik bertugas menjawab "apakah teks ini merupakan sebuah rekayasa kebohongan (deception) dan koersi yang memenuhi unsur niat jahat (mens rea)?". Tahap ini merupakan analisis final yang merangkum dan mengonversi temuan kritis AWK menjadi temuan forensik, dengan mengacu pada pandangan ahli linguistik forensik, khususnya Malcolm Coulthard dan Alison Johnson:

Analisis Deteksi Kebohongan dan Niat (*Deception and Authorial Intent* - Parameter Malcolm Coulthard): Temuan leksikal dari AWK (seperti diksi "Pelindoeng" dan "Cahaja") akan dikaji menggunakan parameter forensik Coulthard terkait deceptive language. Metode ini akan menganalisis tindak tutur komisif dalam teks (janji palsu) yang dikontraskan dengan fakta historis (actus reus). Analisis ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris keberadaan mens rea (niat awal untuk menipu) dari pihak pembuat wacana yang menggunakan bahasa sebagai alibi kamufase untuk menutupi niat eksploitasi ekonomi dan perbudakan (romusha).

Analisis Bahasa Koersif dan Asimetri Kuasa (*Coercive Language* - Parameter Alison Johnson): Temuan dari dimensi praktik wacana AWK (pemaksaan repetisi teks) akan diinvestigasi menggunakan parameter Johnson mengenai interaksi asimetris dan kontrol bahasa oleh pihak yang memiliki otoritas. Kalimat slogan tersebut tidak akan dipandang sebagai sekadar alat komunikasi, melainkan sebagai instrumen interogatif satu arah yang mengebiri hak turn-taking (pengambilan giliran bicara) masyarakat jajahan. Metode ini akan merangkum bagaimana struktur sintaksis yang paralel dan nir-bantahan merupakan bentuk

koersi linguistik yang dirancang untuk memanipulasi persetujuan massal di bawah bayang-bayang ketakutan militer.

Melalui integrasi metodologis ini, AWK berfungsi sebagai instrumen yang menguliti lapisan-lapisan sosiolinguistik wacana, sementara Linguistik Forensik hadir sebagai kerangka pemutus (*adjudicative framework*) yang menyimpulkan keseluruhan analisis. Sinergi kedua pendekatan ini menjamin bahwa pembongkaran arsitektur manipulatif dalam trilogi propaganda Jepang dilakukan secara presisi, tidak hanya sebagai kritik wacana, tetapi sebagai pembuktian anatomi kejahatan linguistik (*language crimes*) berskala masif.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Dekonstruksi Wacana Propaganda Gerakan 3A: Pendekatan AWK Norman Fairclough**

Sebelum memasuki ranah pembuktian linguistik forensik terkait unsur penipuan massal dan manipulasi kognitif, slogan "Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia" harus dibongkar arsitektur wacananya. Slogan ini bukan sekadar deretan leksikon yang disusun secara asimetris, melainkan sebuah konstruksi hegemonik yang didesain secara sistematis oleh Departemen Propaganda Jepang (Sendenbu). Menggunakan kerangka Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough, analisis ini akan membedah slogan tersebut melalui tiga dimensi: analisis teks (mikro), praktik wacana (meso), dan praktik sosial budaya (makro).

##### **Dimensi Teks (Analisis Mikro-Linguistik)**

Pada tingkat mikro, analisis difokuskan pada fitur-fitur linguistik intrinsik yang mencakup pilihan leksikal (diksi), struktur sintaksis, dan peranti retorik yang digunakan untuk merekayasa realitas.

##### ***Pilihan Leksikal dan Semantik (Diksi)***

Penggunaan entitas "Nippon" (bukan "Jepang"): Terdapat kesengajaan politis dalam pemilihan kata "Nippon" (日本 - Negara Matahari Terbit). Leksikon ini membawa muatan semantik tentang keaslian, kebanggaan, dan superioritas kultural, sekaligus menolak nomenklatur "Jepang/Japan" yang merupakan eksonim benuasa Barat. Hal ini berfungsi sebagai afirmasi identitas sentral.

Tiga Nomina Atributif (Cahaya, Pelindung, Pemimpin): Pemilihan tiga nomina ini merepresentasikan gradasi manipulasi psikologis.

Cahaya (Metapora Iluminasi): Bermakna keselamatan dan pencerahan. Jepang memosisikan diri sebagai entitas mesianik yang mengakhiri "kegelapan" masa kolonialisme Belanda (Barat).

Pelindung (Metapora Keamanan): Menciptakan ilusi rasa aman. Kata ini mengonstruksi premis palsu bahwa Asia sedang diancam (oleh Sekutu), dan eksistensi militer Jepang hadir sebagai tameng, bukan agresor.

Pemimpin (Penegasan Hierarki): Setelah ilusi keselamatan dan keamanan terbangun, kata ini mengunci posisi subordinat masyarakat Indonesia. Ini adalah justifikasi hierarkis yang melegitimasi kontrol totaliter.

### ***Struktur Sintaksis dan Paralelisme***

Slogan ini menggunakan struktur klausa ekuatif tanpa kopula (Subjek + Komplemen Nomina) secara berulang. Ketidakhadiran verba atau kopula (seperti "adalah" atau "merupakan") membuat pernyataan ini bersifat absolut dan tidak terbantahkan (unarguable fact). Selain itu, penggunaan majas repetisi anafora (pengulangan kata "Nippon" di awal setiap frasa) dan paralelisme sintaksis menciptakan ritme yang doktriner. Secara psikolinguistik, ritme ini dirancang agar mudah direpetisi, diinternalisasi, dan diteriakkan oleh massa, menciptakan efek hipnotik kolektif.

### ***Ruang Lingkup Entitas "Asia"***

Alih-alih menggunakan kata "Indonesia", slogan ini menggunakan "Asia". Ini adalah bentuk generalisasi spasial yang bertujuan untuk menghapus sentimen nasionalisme lokal dan meleburkannya ke dalam ilusi solidaritas regional (Pan-Asianisme), yang mana pusat orbitnya adalah Nippon.

### ***Dimensi Praktik Wacana (Analisis Meso)***

Dimensi meso menelisik proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks propaganda ini dalam ekosistem komunikasi pada masa pendudukan (1942).

### ***Produksi Wacana***

Slogan ini diproduksi oleh aparaturnegara yang menguasai kapital dan instrumen kekuasaan secara mutlak, yakni Sendenbu (Departemen Propaganda) yang dipimpin oleh Shimizu Hitoshi. Produksi wacana ini bersifat top-down dan nir-oposisi. Tidak ada negosiasi makna dalam perumusannya. Slogan didesain secara kalkulatif oleh para linguis dan propagandis militer untuk mengeksploitasi trauma sosiologis masyarakat Indonesia pasca-penjajahan Belanda.

### ***Distribusi Wacana***

Strategi distribusi yang digunakan bersifat masif, invasif, dan monopolistik. Teks ini tidak sekadar dicetak di surat kabar (Asia Raya), tetapi dikomodifikasi melalui medium multi-sensorik: disiarkan berulang-ulang melalui radio umum (Hoso Kyoku), dipasang di poster jalanan, dan yang paling manipulatif, dijadikan materi wajib di instansi pendidikan. Bahasa dikonversi menjadi instrumen penetrasi ideologi sehari-hari.

### ***Konsumsi Wacana***

Konsumen wacana (masyarakat Indonesia) berada dalam posisi subordinat dengan literasi politik yang dimarjinalkan oleh penjajah sebelumnya. Dalam kondisi krisis dan vakum kekuasaan, masyarakat mengonsumsi teks ini secara literal, memandangnya sebagai janji liberasi (pembebasan) yang profetik. Konsumsi tidak hanya dilakukan secara pasif, tetapi dipaksa menjadi performatif (rakyat diwajibkan meneriakkan yel-yel ini di lapangan/sekolah), yang secara psikologis mempercepat proses cuci otak.

### ***Dimensi Praktik Sosial Budaya (Analisis Makro)***

Dimensi makro meletakkan teks dalam konteks peristiwa historis, struktur kekuasaan, dan ideologi global yang melatarbelakanginya. Wacana linguistik dalam trilogi ini adalah proksi dari praktik penjajahan bentuk baru.

### ***Ideologi Hakko Ichiu dan Fasisme Pan-Asia***

Slogan ini merupakan manifestasi linguistik dari ideologi Hakko Ichiu ("Delapan Penjuru Dunia di Bawah Satu Atap"). Slogan "Cahaya, Pelindung, Pemimpin" menutupi ambisi imperialisme sejati Jepang: ekspansi teritorial militer dan ekstraksi sumber daya alam. Fasisme dibungkus rapi dengan jubah "Solidaritas Asia Raya".

### ***Hegemoni dan Relasi Kuasa***

Jepang memahami bahwa penaklukan fisik (militer) akan memakan biaya besar dan memicu resistensi (pemberontakan). Oleh karena itu, Jepang menggunakan wacana ini untuk mencapai hegemoni—meminjam istilah Gramsci—yaitu kepatuhan yang diperoleh melalui persetujuan (konsensus) yang dimanipulasi, bukan murni lewat paksaan. Dengan memosisikan diri sebagai "saudara tua" dan "pelindung", Jepang sukses memobilisasi jutaan tenaga kerja paksa (romusha) dan merampas hasil panen tanpa perlawanan berarti di awal pendudukan, karena rakyat mengira mereka sedang berkorban untuk "Sang Pelindung".

### ***Konstruksi Realitas Palsu (False Consciousness)***

Secara makro, arsitektur linguistik dalam Gerakan 3A berfungsi untuk memproduksi kesadaran palsu. Linguistik digunakan bukan untuk merepresentasikan realitas (bahwa Jepang adalah penjajah fasis yang sedang krisis logistik perang), melainkan untuk merekonstruksi

realitas (bahwa Jepang adalah juru selamat dekolonisasi). Ini adalah titik krusial di mana linguistik berubah dari alat komunikasi menjadi alat kriminalitas sosiopolitik berskala masif.

### **Analisis Forensik Linguistik: Otopsi Delik Manipulasi dan Fabrikasi Kebohongan Massal**

Jika Analisis Wacana Kritis (AWK) membongkar selubung ideologi dan relasi kuasa di balik teks, maka Linguistik Forensik beroperasi sebagai instrumen investigasi pro-aktif untuk membuktikan adanya "kejahatan berbahasa" (language crimes). Dalam konteks kesejarahan ini, Linguistik Forensik tidak digunakan untuk mengadili individu di ruang sidang, melainkan diaplikasikan sebagai metodologi post-factum (pembuktian setelah fakta berlalu) untuk mengotopsi anatomi penipuan massal, fabrikasi informasi, dan koersi negara yang terekam dalam bukti linguistik.

Sebagai landasan teoretis, analisis ini berpijak pada pandangan para pionir linguistik forensik. Malcolm Coulthard (2007) menegaskan bahwa setiap teks—baik lisan maupun tulisan—selalu meninggalkan "sidik jari linguistik" yang secara forensik dapat melacak niat tersembunyi (authorial intent) dari pembuatnya. Sementara itu, Alison Johnson (dalam Coulthard & Johnson, *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*, 2007) banyak menyoroti asimetri kekuasaan dalam diskursus institusional; bagaimana bahasa digunakan secara sistematis oleh pihak yang memiliki otoritas untuk menekan, memanipulasi, dan memaksa persetujuan pihak yang disubordinasi (koersi linguistik). Meminjam juga kerangka Roger Shuy tentang Language Crimes, analisis ini akan mendakwa slogan “Nippon Cahaya, Pelindung, dan Pemimpin Asia” sebagai sebuah konstruksi delik kebohongan publik yang sistematis.

Berdasarkan parameter forensik tersebut, otopsi terhadap trilogi propaganda 3A diuraikan ke dalam tiga temuan investigatif berikut:

#### ***Pembuktian Mens Rea (Niat Jahat) melalui Analisis Tindak Tutur Janji Palsu (Deceptive Commissive Acts)***

Dalam linguistik forensik, tindak tutur (speech acts) tidak dinilai dari keindahannya, melainkan dari daya ikat hukum dan kebenarannya. Secara forensik, ketika militer Jepang memproklamasikan diksi "Pelindung" dan "Cahaya", mereka sedang melakukan tindak tutur komisif (berjanji atau mengikatkan diri pada suatu tindakan di masa depan). Namun, bukti historis forensik menunjukkan adanya disparitas ekstrem antara teks (janji) dan actus reus (tindakan aktual).

Menurut parameter Coulthard tentang analisis deteksi kebohongan (deception detection), teks yang menipu sering kali mengandung penanda linguistik berupa over-commitment

(komitmen yang berlebihan) tanpa rincian operasional. Slogan ini menjanjikan perlindungan level benua ("Pelindung Asia") namun secara linguistik nihil prasyarat maupun penjelasan mekanisme perlindungan tersebut. Kekosongan modalitas epistemik (tidak adanya kata "mungkin", "akan", "berusaha menjadi") dan digunakannya nomina absolut menunjukkan sebuah fabrikasi. Pembuat teks (Sendenbu) sejak awal produksi wacana telah memiliki mens rea (niat jahat/kriminal) untuk tidak memenuhi tindak tutur komisif tersebut. Diksi "Pelindung" dalam lensa forensik bukanlah sebuah metafora, melainkan sebuah alibi linguistik (tabir penutup niat) yang secara sadar dirancang untuk menutupi niat ekstraksi sumber daya dan perbudakan (romusha). Ini memenuhi unsur delik penipuan terencana (premeditated fraud) di mana bahasa digunakan sebagai alat utama untuk merampas rasionalitas dan harta benda korban.

### ***Koersi Linguistik dan Asimetri Kekuasaan (Perspektif Alison Johnson)***

Alison Johnson dalam kajian linguistik forensiknya banyak membedah bagaimana bahasa koersif (memaksa) bekerja dalam ruang-ruang interogasi dan relasi kuasa yang timpang. Meskipun slogan 3A bukan teks interogasi polisi, teks ini beroperasi dalam ruang asimetri kekuasaan yang jauh lebih absolut: antara pemerintahan militer fasis bersenjata dan populasi sipil yang tertindas.

Dari sudut pandang Johnsonian, ketiadaan verba aktif dalam klausa "Nippon Cahaya Asia" merupakan bentuk manipulasi struktur kalimat yang bertujuan untuk melumpuhkan fungsi dialogis bahasa. Dalam komunikasi normal, sebuah klaim bisa dibantah. Namun, dengan mereduksi kalimat menjadi struktur nominal ekuatif absolut, pemerintah Jepang menutup semua pintu bagi turn-taking (pengambilan giliran bicara) atau bantahan dari pihak masyarakat. Slogan ini tidak didesain untuk dikomunikasikan, melainkan untuk diinjeksi.

Lebih jauh, pemaksaan masyarakat untuk meneriakkan slogan ini berulang kali (repetisi doktriner) merupakan bentuk kejahatan "pemeriksaan kognitif". Dalam forensik, ketika seseorang dipaksa mengucapkan pengakuan atau pernyataan yang tidak ia yakini di bawah ancaman (meskipun secara implisit), maka pernyataan tersebut tidak sah (inadmissible). Jepang menggunakan arsitektur slogan yang padat dan ritmis ini sebagai instrumen koersi linguistik; meretas sistem kesadaran kolektif bangsa Indonesia agar mereka mensugesti diri mereka sendiri bahwa mereka membutuhkan "kepemimpinan" Jepang. Bahasa yang seharusnya menjadi alat artikulasi pikiran, diubah oleh Sendenbu menjadi penjara kognitif.

### ***Pelanggaran Maksim Kualitas demi Modus Operandi Fasisme***

Linguistik Forensik kerap menggunakan instrumen Maksim Kerja Sama H.P. Grice, khususnya Maksim Kualitas (jangan mengatakan apa yang kamu yakini salah/kurang bukti),

untuk melacak penipuan. Dalam komunikasi publik kenegaraan, ada semacam kontrak tidak tertulis bahwa negara harus menyampaikan informasi faktual.

Analisis forensik membuktikan bahwa trilogi 3A adalah bentuk pelanggaran Maksim Kualitas yang paling brutal secara linguistik. Pilihan diksi "Pemimpin Asia" adalah sebuah rekayasa realitas. Jepang menutupi fakta bahwa eksistensi mereka di Asia bukanlah sebuah kepemimpinan organik yang disepakati oleh negara-negara Asia (tidak ada traktat politik yang sah), melainkan sebuah invasi militer. Kata "Pemimpin" merampok hak penentuan nasib sendiri (self-determination) bangsa Indonesia dan menyulap narasi penjajahan menjadi narasi kepengasuhan.

Malcolm Coulthard mencatat bahwa dalam analisis teks forensik, "apa yang tidak diucapkan (omission) sama pentingnya dengan apa yang diucapkan". Trilogi slogan ini secara strategis melakukan penghilangan (linguistic omission) terhadap kata-kata seperti "perang", "militer", "kewajiban", atau "tunduk". Dengan menghilangkan penanda leksikal kekerasan dan menggantinya dengan penanda leksikal paternalistik ("Cahaya", "Pelindung"), teks ini memanifestasikan bentuk linguistic camouflage (kamufase linguistik) tingkat tinggi.

Kesimpulannya, melalui otopsi linguistik forensik, trilogi "Nippon Cahaya, Pelindung, dan Pemimpin Asia" terbukti secara empiris bukan sekadar slogan heroik. Teks ini adalah artefak kriminal (linguistic evidence of a crime) yang merekam jejak operasi pembohongan massal terstruktur, manipulasi psikologis, dan koersi kognitif, yang didesain secara presisi oleh rezim fasis dengan mens rea yang sangat jelas: untuk membius kesadaran sebuah bangsa agar bersedia dieksploitasi tanpa perlawanan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini secara konklusif membuktikan bahwa trilogi slogan propaganda Gerakan 3A, "Nippon Tjahaja Asia, Nippon Pelindoeng Asia, Nippon Pemimpin Asia", bukanlah sekadar artefak sejarah yang berisi retorika eufemistik belaka, melainkan sebuah instrumen kejahatan linguistik (language crimes) berskala masif. Melalui pisau bedah Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough, terungkap bahwa arsitektur wacana ini sengaja direkayasa dengan tingkat presisi manipulatif yang luar biasa tinggi. Pada tataran mikrolinguistik, pemilihan triptik leksikal "Cahaya, Pelindung, Pemimpin" dan struktur sintaksis klausa ekuatif tanpa kopula berfungsi mereduksi realitas penjajahan menjadi aksioma absolut yang nir-bantahan. Pada tataran meso dan makro, teks tersebut diproduksi secara monopolistik oleh Sendenbu, didistribusikan secara invasif, dan dikonsumsi melalui pemaksaan performatif demi menciptakan false consciousness (kesadaran palsu) yang melegitimasi ideologi fasis Hakko

Ichiu. Wacana dikomodifikasi untuk meraih hegemoni dan persetujuan semu dari masyarakat jajahan.

Temuan dekonstruktif dari AWK tersebut mendapatkan "vonis akademisnya" ketika diekskavasi lebih jauh menggunakan Linguistik Forensik sebagai grand theory. Otopsi linguistik menggunakan parameter Malcolm Coulthard menegaskan bahwa teks propaganda ini memenuhi unsur delik penipuan (deception). Terdapat disparitas yang terencana antara tindak tutur komisif (janji pencerahan dan perlindungan) di dalam teks dengan actus reus (tindakan aktual militer Jepang) yang justru mengeksekusi perbudakan romusha dan perampasan sumber daya. Hal ini membuktikan secara empiris keberadaan mens rea (niat jahat) dari pemerintah militer Jepang sejak awal perumusan teks; menjadikan kata "Pelindung" tidak lebih dari sekadar alibi linguistik untuk menutupi niat eksploitasi.

Lebih jauh, analisis forensik menggunakan kerangka Alison Johnson mengonfirmasi adanya operasi koersi linguistik yang lahir dari asimetri kekuasaan ekstrem. Pemerintah fasis Jepang tidak mendesain bahasa untuk tujuan dialogis, melainkan menjadikannya sebagai penjara kognitif. Repetisi doktriner yang dipaksakan kepada rakyat berfungsi melumpuhkan nalar kritis dan menutup semua celah turn-taking (pengambilan giliran bicara) atau negosiasi. Bahasa yang seharusnya menjadi simbol kemerdekaan berpikir, dibajak menjadi alat penundukan psikologis yang mematikan.

Sebagai sintesis akhir, penelitian ini menegaskan bahwa kolonialisme dan fasisme tidak hanya bekerja melalui letusan peluru dan penjara fisik, tetapi juga dioperasikan melalui moncong fabrikasi kata-kata. Slogan Gerakan 3A adalah bukti historis dan forensik yang valid mengenai bagaimana arsitektur linguistik yang manipulatif dapat digunakan oleh pemegang otoritas untuk meretas kesadaran sebuah bangsa, merampok rasionalitas kolektif, dan melegalkan kejahatan kemanusiaan di bawah kamufase narasi penyelamatan. Kesimpulan ini sekaligus membunyikan alarm kritis bagi diskursus kontemporer: bahwa kejahatan berbahasa—berupa fabrikasi informasi, janji palsu, dan manipulasi realitas—akan selalu menjadi senjata paling mematikan bagi kekuasaan yang tiran, baik di masa lalu maupun di era post-truth saat ini.

**DAFTAR REFERENSI**

- A Baranov, & P Parshin. (2017). THE CATEGORY OF PROPAGANDA IN LINGUISTIC TEXTUAL ANALYSIS. In *Теория и практика судебной экспертизы Том* (Vol. 12, Number 2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30764/1819-2785-2017-12-2-53-65>
- Correa, M. (2013). Forensic Linguistics: An Overview of the Intersection and Interaction of Language and Law. *Studies About Languages*, 0(23). <https://doi.org/10.5755/j01.sal.0.23.5020>
- Eka Firmansyah, Syamsul Arifin, & M. Nurul Humaidi. (2023). *Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum Zaman Jepang* (Vol. 6). <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v6i12.3127>
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). *SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG*. <https://doi.org/10.17977/um020v13i22019p189>
- Firmansyah, A., Mirzacherulsyah, E., & Yafi, R. A. (2021). PROPAGANDA JEPANG DALAM SURAT KABAR BORNEO BARAT SHINBUN EDISI TAHUN 1942. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 17(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/istoria.v17i2.42980>
- Gunawan. (2017). *PENERAPAN HAKKO ICHIU DALAM MEWUJUDKAN CITA-CITA JEPANG MEMBENTUK NEGARA ASIA TIMUR RAYA (1940-1945)*.
- Hameed Hassoon Bjaiya Al-Mas'udi, & A'mer Sagheer Allwan Al-A'mery. (2021). *Fairclough and van Dijk Models of Critical Discourse Analysis*.
- Ishak, M. (2012). *SISTEM PENJAJAHAN JEPANG DI INDONESIA*.
- Khaja, H., & Irfan, M. (2019). AN ANALYSIS OF THE LINGUISTIC TECHNIQUES OF PROPAGANDA IN MARKETING AND POLITICS. *International Journal of English Learning and Teaching Skills*, 2(2), 2639–7412. <https://doi.org/https://doi.org/10.15864/ijelts.2213>
- Kurasawa, A. (1987). *PROPAGANDA MEDIA ON JAVA UNDER THE JAPANESE 1942-1945*. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/3351221>
- Malcolm Coulthard, & Alison Johnson. (2007). An Introduce To Forensic Linguistics Language in Evidence. *Taylor & Francis E-Library*.
- Norman Fairclough. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*.
- Predrag Dojčinović, Dr. Saskia Baas, Mohamed Elewa Badar, Rogier Bartels, Robert J. Donia, Dr. Polona Florijančič, Gregory S. Gordon, Celia Guillard, Rebecca J. Hamilton, Lasana T. Harris, Jourdan Kiper, Molly K. Land, Clare Lawson, Évariste Ntakirutimana, Dr. Wibke K. Timmermann, Marie-Claire Uwamariya, & Richard Ashby Wilson. (2020). *Propaganda and International Criminal Law*. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780429443695-11>
- Riyadh Tariq Kadhim Al-Ameedi, & Zina Abdul Hussein Khudhier. (2015). *A Pragmatic Study of Barak Obama's Political Propaganda* (Vol. 6, Number 20). Online. [www.iiste.org](http://www.iiste.org)
- Ronauli, A., Saputri, A. D., Br Nainggolan, L., Sumbayak, D., & Sinaga, R. (2025). Perang Dunia II dan Perubahan Lanskap Kekuasaan di Indonesia: Pendudukan Jepang dan Respons Rakyat. In *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary E-ISSN* (Vol. 3, Number 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/jerumi.v3i1.6474>

- Sihombing, M., Sianturi, L. Y., & Oktavia, N. W. (2024). *Perubahan Politik di Indonesia Selama Masa Pendudukan Jepang*. <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/jahe.v1i2.3915>
- Tarassenko, Y. (2019). THE QUANTUM-SEMANTIC PSYCHOLINGUISTIC ANALYSIS METHOD FOR THE ENGLISH-LANGUAGE TEXT OF PROPAGANDA DISCOURSE. *Advanced Information Systems*, 3(4), 62–68. <https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.4.09>
- Teun A Van Dijk. (2008). *Discourse and Power*.
- Wicaksono, P. (2021). *Perubahan kondisi sosial Indonesia pada masa kependudukan Jepang 1942-1945*. <https://doi.org/https://doi.org/10.17977/um081v1i12021p90-95>
- Yuni Wachid Asrori. (2024). *INVASI JEPANG DI SEMENANJUNG KOREA DAN HINDIA BELANDA: RESISTENSI BANGSA KOREA DAN INDONESIA KEPADA JEPANG* (Vol. 16, Number 2). <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/humanis.v16i2.6583>
- Zahri Nasution. (2007). *Bahasa sebagai Alat Komunikasi Politik dalam Rangka Mempertahankan Kekuasaan* 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.22500/SODALITY.V1I3.5897>